

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi, terutama bencana hidrometeorologi seperti banjir. Kondisi ini dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia yang berada di wilayah tropis dengan curah hujan tinggi sepanjang tahun. Intensitas hujan yang besar meningkatkan risiko genangan dan luapan sungai di berbagai wilayah. Selain itu, variasi musim yang tidak menentu menyebabkan pola curah hujan sulit diprediksi secara akurat. Perubahan iklim global turut memperkuat anomali cuaca yang berdampak pada peningkatan kejadian banjir. Hal ini menunjukkan bahwa faktor alam dan iklim memiliki peran kuat dalam membentuk kerentanan bencana di Indonesia.

Banjir menjadi salah satu jenis bencana yang paling sering terjadi di Indonesia dan memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Dampak tersebut tidak hanya terbatas pada kerugian material seperti kerusakan rumah dan infrastruktur. Banjir juga mengganggu aktivitas sosial masyarakat karena mobilitas menjadi terhambat. Dari sisi ekonomi, masyarakat mengalami penurunan pendapatan akibat terganggunya kegiatan usaha. Selain itu, kondisi kesehatan masyarakat ikut terdampak melalui meningkatnya risiko penyakit berbasis lingkungan. Oleh karena itu, banjir menjadi perhatian utama dalam kebijakan penanggulangan bencana di tingkat nasional maupun daerah.

Selain faktor alam, kejadian banjir juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang tidak terkendali. Perubahan tata guna lahan menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya risiko banjir. Alih fungsi hutan menjadi permukiman atau lahan pertanian mengurangi daya serap air tanah. Pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan mempercepat aliran permukaan air. Kurangnya sistem drainase yang memadai juga memperparah kondisi genangan di wilayah tertentu. Kondisi ini memperkuat potensi banjir terutama di daerah yang secara geografis sudah rentan.

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana banjir. Wilayah ini didominasi oleh dataran rendah yang cenderung sulit mengalirkan air secara cepat. Keberadaan kawasan rawa menyebabkan air mudah tertahan dan menggenang dalam waktu lama. Kondisi ini membuat wilayah tersebut sering mengalami banjir saat musim hujan. Selain itu, kapasitas drainase alami di wilayah ini relatif terbatas dalam menampung volume air yang besar. Hal ini memperjelas bahwa faktor geografis menjadi penyebab utama tingginya kerentanan banjir di daerah ini.

Selain kondisi geografis, Kabupaten Hulu Sungai Utara juga dipengaruhi oleh sistem aliran sungai yang kompleks. Wilayah ini dilalui oleh beberapa sungai yang menjadi bagian penting dari sistem hidrologi daerah. Ketika curah hujan di wilayah hulu meningkat, debit air yang mengalir ke daerah ini ikut bertambah. Peningkatan debit air tersebut sering

kali melebihi kapasitas sungai untuk menampung aliran. Akibatnya, air meluap ke permukiman dan lahan masyarakat di sekitarnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor hidrologi berperan besar dalam memicu terjadinya banjir di wilayah tersebut.

Karakteristik geografis tersebut menjadikan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai daerah yang hampir setiap tahun mengalami banjir. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi. Frekuensi kejadian banjir yang berulang memperlihatkan adanya pola yang konsisten setiap tahun. Hal ini menandakan bahwa kapasitas lingkungan dalam menampung air sudah terbatas. Risiko yang tinggi tersebut menuntut adanya penanganan yang terencana dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya mitigasi yang efektif untuk mengurangi dampak bencana banjir di wilayah ini.

Kecamatan Amuntai Tengah merupakan salah satu wilayah yang paling terdampak banjir di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Wilayah ini memiliki kondisi topografi yang relatif datar sehingga aliran air menjadi lambat. Sistem drainase yang terbatas memperparah kondisi genangan saat curah hujan meningkat. Air yang masuk ke wilayah ini sulit dialirkan kembali ke sungai atau saluran utama. Akibatnya, genangan dapat bertahan dalam waktu yang cukup lama. Kondisi ini menjadikan Amuntai Tengah sebagai wilayah dengan tingkat kerentanan yang tinggi terhadap banjir.

Berdasarkan data kejadian bencana yang tersedia, banjir di Kecamatan Amuntai Tengah menunjukkan kecenderungan peningkatan dari sisi dampak material. Pada kejadian banjir tahun 2024 tercatat sebanyak 1.815

rumah terdampak genangan. Sementara itu, pada tahun 2025 jumlah rumah terdampak meningkat menjadi 1.912 unit atau bertambah sebanyak 97 rumah dibandingkan periode sebelumnya. Selain itu, data tahun 2025 menunjukkan tingkat dampak yang lebih rinci dengan tercatat sebanyak 341 rumah mengalami kondisi terendam penuh. Peningkatan jumlah rumah terdampak tersebut mengindikasikan bertambahnya cakupan wilayah genangan maupun meningkatnya intensitas dampak banjir terhadap kawasan permukiman. Di samping itu, banjir juga berdampak pada infrastruktur publik dengan panjang jalan terdampak mencapai 3.770 meter pada tahun 2025. Berdasarkan indikator kebencanaan, peningkatan jumlah objek terdampak tersebut dapat dikategorikan sebagai peningkatan tingkat dampak bencana meskipun tidak terjadi peningkatan korban jiwa.

Beberapa desa di Kecamatan Amuntai Tengah, mengalami banjir secara rutin setiap tahun. Kejadian ini menunjukkan bahwa banjir bukan lagi peristiwa insidental tetapi sudah menjadi pola tahunan. Intensitas genangan yang terjadi juga cenderung berulang dengan karakteristik yang sama. Hal ini memperlihatkan adanya masalah struktural dalam pengelolaan lingkungan dan air. Kerentanan wilayah tersebut semakin meningkat karena tidak ada perubahan signifikan dalam penanganannya. Kondisi ini menegaskan bahwa wilayah tersebut memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana banjir.

Banjir yang terjadi secara berulang di wilayah ini menimbulkan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Dari aspek sosial, banjir menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari masyarakat. Kegiatan

pendidikan sering terhenti karena akses menuju sekolah terendam air. Aktivitas kerja masyarakat juga ikut terganggu akibat mobilitas yang terbatas. Interaksi sosial masyarakat menjadi terhambat karena kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Hal ini menunjukkan bahwa banjir berdampak langsung terhadap stabilitas sosial masyarakat.

Dari aspek ekonomi, banjir menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi masyarakat terdampak. Rumah warga mengalami kerusakan akibat terendam air dalam waktu lama. Lahan pertanian tidak dapat digunakan sehingga hasil produksi menurun. Infrastruktur publik seperti jalan dan fasilitas umum juga mengalami kerusakan. Kondisi ini menyebabkan biaya pemulihan yang cukup tinggi bagi masyarakat dan pemerintah. Dampak tersebut secara langsung menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah terdampak.

Sementara itu, dari aspek lingkungan, banjir dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan yang cukup signifikan. Genangan air yang berlangsung lama memicu terjadinya kerusakan ekosistem di wilayah terdampak. Limbah rumah tangga yang terbawa arus air mencemari lingkungan sekitar permukiman. Kondisi ini menyebabkan penurunan kualitas air yang digunakan oleh masyarakat. Selain itu, genangan yang kotor dapat menimbulkan bau tidak sedap dan menjadi sumber penyakit. Hal ini menunjukkan bahwa banjir tidak hanya berdampak secara sosial dan ekonomi, tetapi juga merusak lingkungan.

Dalam upaya penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki peran strategis di tingkat daerah. Lembaga ini

bertanggung jawab dalam mengelola risiko bencana secara terencana dan terarah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjalankan fungsi mulai dari tahap pencegahan hingga pemulihan pascabencana. Setiap tahapan membutuhkan koordinasi yang baik antar pihak terkait. Peran ini menuntut adanya kinerja organisasi yang efektif dan responsif. Oleh karena itu, BPBD menjadi aktor utama dalam penanganan bencana di daerah.

Mitigasi bencana merupakan salah satu aspek penting dalam penanggulangan bencana yang bertujuan mengurangi risiko dan dampak. Upaya mitigasi dilakukan sebelum bencana terjadi sebagai langkah preventif. Perencanaan yang matang menjadi dasar dalam menentukan strategi mitigasi yang tepat. Edukasi kepada masyarakat juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran terhadap risiko bencana. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang mendukung menjadi bagian penting dalam mengurangi dampak banjir. Hal ini menunjukkan bahwa mitigasi memerlukan pendekatan yang terintegrasi.

Namun demikian, pelaksanaan mitigasi bencana banjir di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih menghadapi berbagai tantangan. Program mitigasi yang telah disusun belum sepenuhnya mampu mengurangi kejadian banjir. Banjir masih terjadi secara rutin setiap tahun di beberapa wilayah. Kecamatan Amuntai Tengah menjadi salah satu daerah yang terus terdampak. Hal ini menunjukkan adanya kendala dalam implementasi kebijakan di lapangan. Kondisi ini menandakan bahwa upaya mitigasi belum berjalan secara maksimal.

Fenomena yang terjadi di Kecamatan Amuntai Tengah menunjukkan bahwa kinerja BPBD dalam mitigasi bencana banjir belum berjalan secara optimal, dapat dilihat dari :

1. Kurang optimalnya capaian jumlah layanan yang dihasilkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam program mitigasi prabencana. Kondisi ini terlihat dari sangat terbatasnya aktivitas mitigasi yang dapat diidentifikasi secara langsung di lapangan, di mana sejauh ini kegiatan yang tampak baru sebatas sosialisasi kepada masyarakat. Masalah tersebut dipertegas oleh lemahnya akuntabilitas dan transparansi administrasi, yang ditandai dengan tidak adanya data komprehensif mengenai jenis, rincian, maupun sebaran wilayah kegiatan layanan yang telah dilaksanakan. Akibatnya, muncul kesenjangan yang signifikan antara tugas fungsi BPBD dalam menyelenggarakan mitigasi prabencana yang menyeluruh dengan realitas di lapangan yang minim realisasi kegiatan serta tidak didukung oleh keterbukaan data kinerja yang jelas. (*Sumber: observasi awal peneliti*).
2. Pencapaian target program mitigasi bencana banjir belum dapat diukur secara optimal karena belum tersedia data yang valid, lengkap, dan terukur mengenai tingkat keberhasilan program yang telah dilaksanakan. Meskipun berbagai kegiatan mitigasi telah dilaksanakan sesuai dengan program yang direncanakan, belum terdapat pengukuran yang jelas terhadap capaian target program. Selain itu, pelaksanaan program juga masih menghadapi keterbatasan personel dan sarana

pendukung yang berpotensi memengaruhi pencapaian tujuan program. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian target program mitigasi banjir belum dapat diketahui secara pasti sehingga keberhasilan program sulit dievaluasi secara objektif. (*Sumber: observasi awal peneliti*).

3. Respons BPBD dalam memberikan pelayanan pada saat terjadi banjir masih belum dilakukan secara cepat dan optimal. Dalam beberapa kondisi banjir, petugas baru turun ke lapangan ketika genangan air sudah cukup tinggi dan berdampak kepada masyarakat. Bahkan pada beberapa kejadian, kegiatan penanganan maupun mitigasi baru dilaksanakan ketika kondisi banjir mulai surut sehingga upaya yang dilakukan belum mampu mengurangi dampak bencana secara maksimal sejak awal. Meskipun BPBD tetap melakukan koordinasi, pemantauan lapangan, dan penyampaian informasi kepada masyarakat, kecepatan pelayanan masih belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, sarana pendukung, dan luasnya wilayah yang harus ditangani turut memengaruhi kecepatan respons BPBD dalam memberikan pelayanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kecepatan dan kemudahan pelayanan BPBD dalam mitigasi bencana banjir masih belum optimal. (*Sumber: observasi awal peneliti*).

4. Masyarakat yang terdampak banjir masih harus menunggu cukup lama setelah menyampaikan laporan atau keluhan kepada BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam beberapa kejadian, penanganan terhadap

laporan masyarakat belum dapat dilakukan secara langsung karena harus melalui proses pendataan, verifikasi, dan koordinasi dengan instansi terkait. Akibatnya, bantuan maupun tindakan penanganan sering kali baru diberikan ketika kondisi banjir sudah semakin tinggi atau setelah masyarakat melakukan upaya penanganan secara mandiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak lanjut terhadap laporan dan keluhan masyarakat belum sepenuhnya berlangsung secara cepat sehingga kebutuhan masyarakat terdampak banjir belum dapat dipenuhi secara tepat waktu. *(Sumber: observasi awal peneliti).*

5. Pelaksanaan kegiatan mitigasi banjir di BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara belum didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi secara resmi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Meskipun kegiatan mitigasi tetap dilaksanakan melalui koordinasi, pembagian tugas, dan pelaksanaan kegiatan di lapangan, belum terdapat dokumen SOP yang dapat dijadikan acuan baku dalam pelaksanaan mitigasi banjir. Berdasarkan hasil observasi dan keterangan dari beberapa pihak di BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara, SOP mitigasi banjir masih dalam tahap penyusunan sehingga belum tersedia secara lengkap. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan kegiatan lebih banyak mengacu pada arahan pimpinan, pengalaman kerja, serta koordinasi antarbidang. Keadaan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mitigasi banjir belum memiliki pedoman operasional yang terdokumentasi secara jelas sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. *(Sumber: observasi awal peneliti).*

Dari uraian fenomena diatas maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian lebih lanjut mengenai Kinerja Badan Penanggulangan Badan Daerah Hulu Sungai Utara Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Kecamatan Amuntai Tengah.

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian di sini dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang akan dibahas, agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai permasalahan dan pembahasan terhadap masalah menjadi terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang peneliti bahas. Maka peneliti memfokuskan penelitian menurut Teori Dwiyanto dalam Hasbani Pasolong, (2017 : 206-208) maka difokuskan pada :

1. Produktivitas
2. Kualitas Layanan
3. Responsivitas
4. Responsibilitas
5. Akuntabilitas

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja BPBD Hulu Sungai Utara dalam mitigasi bencana banjir di Kecamatan Amuntai Tengah?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi kinerja BPBD dalam mitigasi banjir?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui seberapa besar Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kecamatan Amuntai Tengah.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat dalam Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kecamatan Amuntai Tengah.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memperkaya kajian dalam bidang administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan kinerja organisasi sektor publik dalam penanggulangan bencana.
- b. Memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep kinerja organisasi dengan mengaitkannya pada konteks mitigasi bencana banjir yang bersifat kompleks dan lintas sektor.
- c. Memperkuat pemahaman mengenai penerapan indikator kinerja seperti produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas dalam institusi publik.
- d. Menjadi referensi empiris bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa, terutama dalam konteks daerah rawan bencana.

- e. Dalam mengembangkan pendekatan teoritis yang lebih kontekstual dan aplikatif dalam studi administrasi publik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara Memberikan informasi faktual mengenai kinerja BPBD dalam mitigasi bencana banjir berdasarkan aspek efisiensi, efektivitas, keadilan, dan daya tanggap.
- b. Bagi Masyarakat Menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan mitigasi bencana banjir serta peran BPBD dalam penanganan bencana di lingkungan sekitar.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya Menjadi referensi ilmiah dan bahan perbandingan dalam penelitian yang berkaitan dengan kinerja organisasi publik dan kebencanaan.

